

# **TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

# PENGARUH PEMBANGUNAN PPN KARANGANTU TERHADAP PERSEPSI KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen Perikanan

Disusun Oleh:

RUSLI NIM. 015017757

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA

2019

#### PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Pembangunan PPN Karangantu terhadap Persepsi

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

Penyusun TAPM : Rusli

NIM : 015017757

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen

Perikanan

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017

Menyetujui:

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. Ir. Rinda Noviyanti, M.Si NIP. 19661103 199903 2 001 Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si NIP. 19691106 199702 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Mulyono S. Baskoro, M.Sc.

NIP. 19620303 198803 1 001

Mengetahui,

Kabid MIPA

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si

NIP. 19631111 198803 2 002

Suerati, M.Sc, Ph.D NI<del>P. 19</del>520213 198503 2 001

# UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN

#### **PENGESAHAN**

Nama : Rusli

NIM : 015017757

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen

Perikanan

Judul TAPM : Pengaruh Pembangunan PPN Karangantu terhadap

Persepsi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Kamis/15 Juni 2017

Waktu : 14.00 - 15.30 WIB

Dan telah dinyatakan Lulus

#### PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji: Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si

Penguji Ahli : Prof. Dr. Mulyono S. Baskoro, M.So

Pembimbing I : Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si

Pembimbing II : Dr. Ir. Rinda Noviyanti, M.Si

# UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN

#### **PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Pengaruh Pembangunan PPN Karangantu Terhadap Persepsi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Juni 2017

Yang menyatakan,

TERAL TO THE PER STATE OF THE PER STATE

Rusli NIM. 015015757

#### **ABSTRAK**

# Pengaruh Pembangunan PPN Karangantu Terhadap Persepsi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

# Rusli Universitas Terbuka ruslinoer1@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat produksi perikanan setelah adanya pembangunan PPN Karangantu, menganalisis pengaruh pembanguanan PPN Karangantu terhadap penyerapan tenaga keria dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat di sekitar lokasi PPN Karangantu, serta menganalisis pandangan subjektif (persepsi) masyarakat sekitar tentang pengaruh pembangunan pelabuhan perikanan terhadap lingkungan sekitar. Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan berpengaruh positif terhadap produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Karangantu, dan kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan berpengaruh positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dalam hal peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan serta berpersepsi positif tentang pembangunan PPN terhadap kondisi lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan Volume Produksi perikanan di PPN Karangantu pada tahun 2002-2012 rata-rata produksi masih positif yaitu sebesar 2115, 45 ton dengan persentase rata-rata kenaikan produksi 9,67%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan Nilai Produksi perikanan pada tahun 2002 sampai tahun 2012 bergerak positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 17.64%. Hal ini menunjukan bahwa Pembangunan PPN Karangantu memberikan pengaruh positif terhadap Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di wilayah PPN Karangantu. Persepsi masyarakat terhadap penyerapan Tenaga Kerja dengan adanya Pembangunan PPN karangantu cenderung meningkat 72 %, sedangkan terhadap Peningkatan Pendapatan, sebanyak 82 % berpersepsi meningkat dibanding sebelum adanya Pembangunan PPN Karangantu. Artinya pembangunan PPN Karangantu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar Pelabuhan Perikanan Karangantu. Persepsi terhadap kondisi lingkungan antara lain, untuk persepsi kondisi kebersihan perairan sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung Semakin Baik. Untuk Persepsi kondisi bau kebersihan perairan sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung tidak ada perubahan. Untuk persepsi kondisi rasa air cenderung tidak ada perubahan dan cenderung semakin baik. Untuk persepsi kondisi warna air termasuk air minum, sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung tidak ada perubahan. Untuk persepsi kondisi sampah sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung semakin buruk. Untuk persepsi kondisi Limbah perikanan cenderung semakin buruk. Untuk persepsi kondisi MCK cenderung tidak berubah. Sedangkan untuk persepsi kondisi tempat tinggal masyarakat cenderung tidak berubah.

**Kata kunci**: Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, sosial ekonomi masyarakat, Pelabuhan perikanan.

#### **ABSTRACT**

The Influence of the Development of Nusantara Fishing Port Karangantu on the Perception of the Socio-Economic Condition of the Surrounding Communities

# Rusli Universitas Terbuka ruslinoer1@gmail.com

This study aims to analyze the level of fisheries production after the construction of the Karangantu Archipelago Fishing port (PPN Karangantu), analyze the effect of the development of the PPN Karangantu on labor absorption and increase in income for the communities around the PPN Karangantu location, and analyze the subjective views (perceptions) of the surrounding community about the influence of fishing port development on the environment around. The research hypothesis states that port development has a positive effect on landfill production landed at PPN Karangantu, and fisheries port development activities have a positive effect on the socio-economic conditions of the surrounding communities in terms of increasing employment and income as well as having positive perceptions about the construction of PPN KARANGANTU on environmental conditions. The results showed that overall fisheries production volume in PPN Karangantu in 2002-2012 the average production was still positive at 2115, 45 tons with an average percentage of production increase of 9.67%. Whereas if viewed based on the value of fisheries production in 2002 to 2012 move positively with an average increase of 17.64%. This shows that the development of PPN Karangantu has a positive influence on the Production Volume and Production Value of Fisheries in the PPN Karangantu area. Public perceptions of employment absorption with the development of PPN Karangantu tended to increase by 72%, whereas for Income Increase, 82% perceived an increase compared to before the PPN Karangantu Development. This means that the development of the PPN Karangantu affects the income of the community around the PPN Karangantu, Perceptions of environmental conditions, among others, for perceptions of the cleanliness of the waters before and after the construction of PPN KARANGANTU tend to be better. For perceptions of the odor condition of the cleanliness of the waters before and after the PPN KARANGANTU Development tends to be unchanged. For perceptions of the condition of the taste of water tends to be no change and tends to be better. For perceptions of the condition of the color of water, including drinking water, before and after the development of PPN KARANGANTU, there tends to be no change. The perception of the condition of the waste before and after the construction of PPN KARANGANTU tends to get worse. For perceptions of conditions for fisheries waste tends to get worse. For the perception of MCK conditions, they tend not to change. Whereas the perception of the conditions of living of the people tends to not change.

Keywords: Karangantu Archipelago Fishing Port, socio-economic community, fishing port...

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains, Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- 2. Kepala UPBJJ-UT, sebagai penyelenggara Program Pascasarjana;
- 3. Bapak Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si dan Ibu Dr. Ir. Rinda Noviyanti, M.si selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- 4. Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Ilmu Kelautan bersama Jajarannya;
- 5. Ir. Sri Hartoyo, MM selaku kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Banten, yang telah memberikan data dan informasi.
- Istriku Susi Ambar Hapsari dan anak-anakku Amrullah Rosadi, S.Kel; Alfarezi Ridwanda, Arifin Roihan, yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan TAPM ini,
- Teman teman di Direktorat Pelabuhan Perikanan dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan DJPT, yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk terselesaikannya TAPM ini.
- 8. Sahabat maupun semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini;

Mengingat keterbatasan yang ada, maka penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik guna perbaikan lebih lanjut.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi yang membutuhkannya.

Jakarta, Juni 2017

Rusli

# DAFTAR ISI

		Halar	man
I.	PEN	DAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Perumusan Masalah	3
	C.	Kerangka Penelitian	3
	D.	Tujuan Penelitian	5
	E.	Hipotesis Penelitian	5
	F.	Kegunaan Penelitian	5
TT	TITAL	JAUAN PUSTAKA	7
11.			7
	A.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	9
	B.	Sejarah Pelabuhan Perikanan	
	C.	Pembangunan Pelabuhan Perikanan	15
	D.	Konsepsi Pembangunan Prasarana Pelatihan Perikanan	16
	E.	Landasan Hukum Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Perikanan	18
	F.	Fungsi, Peranan dan Kriteria Pelabuhan Perikanan	20
	G.	Operasional Pelabuhan Perikanan	23
Ш	ME	TODE PENELITIAN	25
	Α.	Waktu dan Tempat Penelitian	25
	В.	Ruang Lingkup Penelitian	25
	C.	Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	26
	С.	1. Penetapan Responden	26
		Pengumpulan Data	28
		3. Metoda Analisa Data	29
		5. Wetoda Ahansa Data	2)
IV	.HAS	SIL DAN PEMBAHASAN	33
	A.	Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	33
		1. Visi dan Misi	33
		2. Tuju <mark>an dan Sasaran</mark>	34
	B.	Kegiatan Sosial ekonomi di PPN Karangantu	35
		1. Keragaan PPN Karangantu	37
		2. Frekuensi Kunjungan Kapal ke PPN Karangantu	38
		3. Jumlah Nelayan PPN Karangantu	39
		4. Kegiatan Perbengkelan	41
		5. Jasa Pelayanan Es	41
		6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	41
	C.	Produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	44
	D.	Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapat Masyarakat	47
	D.	Persepsi Penyerapan Tenaga dan Pendapatan Masyarakat	48
			40
		2. Pengaruh Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Adanya	EO
		Pembangunan PPN Karangantu	50
		3. Pengaruh Pembangunan PPN Karangantu Terhadap Peyerapan Tenaga	~ 4
	_	Kerja dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di PPN Karangantu	51
	E.	Persepsi Masyarakat Terhadap Lingkungan PPN Karangantu	52

V. K	ESIMPULAN DAN SARAN	58
A.	Kesimpulan	58
В.	Saran	59
DAFT.	AR PUSTAKA	60
LAMP	YIRAN	64
DOKU	MENTASI	67



# DAFTAR TABEL

Nom	nor	lalaman
1.	Kriteria Klasifikasi PP menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.16/MEN/2006	. 22
2.	Tempat dan Waktu Penelitian	. 26
3.	Skala Likert untuk Persepsi	. 31
4.	Skala Likert untuk Pengaruh	32
5.	Frekwensi Kedatangan Kapal Yang Mendarat di Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu Tahun 2008 - 2012. (Satuan= Kali)	42
6.	Jumlah nelayan yang melakukan aktivitas di PPP Karangantu	. 42
7.	Jumlah Kegiatan Pelayanan Bengkel di PPN karangantu	. 43
8.	Penyaluran Es Balok Tahun 2012	45
9.	Perincian Penerimaan Negara Bukan Pajak	. 46
10.	Produksi dan Nilai Ikan Produksi PPN Karangantu Tahun 2002-2012	. 47
11.	Persepsi Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan terhadap adanya Pembangunan PPN Karangantu	. 50
12.	Skala Likert Persepsi Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan di sekitar PPN Karangantu	51
13.	Persepsi Masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu terhadap Kondisi Lingkungan	55
14.	Hasil Skala Likert Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan di Sekitar	57

# **DAFTAR GAMBAR**

Non	nor Hala	ıman
1.	Kerangka Pemikiran Kajian Pembangunan PPN Karangantu dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	4
2.	Gerbang menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	70
3.	Foto udara Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	70
4.	Fasilitas pokok dan fasilitas fungsional	71
5.	Akses jalan menuju pantai	71
6.	Kegiatan pembongkaran ikan di Dermaga	72
7.	Kegiatan di TPI Hygienis	72
8.	Kegiatan Pelelangan Ikan di TPI Hygienis	73
9.	Pabrik es kapasitas 13 ton/hari	73
10.	Kegiatan bengkel PPN karangantu	74
11.	Gedung Pertemuan Nelayan dan akses jalan di komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	74
12.	Kegiatan ojeg dan alat angkut lain	75
13.	Warung, lapak jual ikan dan ojeg	75
14.	Kegiatan kebersihan lingkungan dan latar MCK	76
15	Penjual ikan dan warung kelontong	76

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Non	nor	Halaman
1.	Data Produksi dan nilai produksi ikan menurut jenisnya di PPN Karangantu ta 2002 -2011	
2.	Grafik Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu tahun 200 2012	
3.	Grafik Persepsi Masyarakat sekitar PPN Karangantu terhadap Kondisi Lingkungan	68
4.	Perhitungan Paired Sample T Test	69

#### BAB I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pelabuhan perikanan, sebagaimana tercantum dalam UU nomor: 45 tahun 2009 tentang Perikanan, adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem usaha perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Namun demikian, dalam pembangunan pelabuhan perikanan bukan hanya pengadaaan fasilitas saja, tetapi yang lebih penting adalah mengupayakan agar pelabuhan perikanan tersebut dapat bermanfaat dan berfungsi secara optimal.

Pemerintah membangun dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi antara lain, sebagai tempat tambat-labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan. Dalam pasal 12 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16 tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan, dijabarkan bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas yang berada di Pelabuhan Perikanan (Anonimous, 2007-d).

Pengelolaan pelabuhan perikanan dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk meningka tkan taraf hidup nelayan, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatam kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan,

meningkatkan produktivitas; mutu; nilai tambah; dan daya saing. Pengelola pelabuhan perikanan, berkewajiban untuk mengupayakan pelayanan prima kepada seluruh stakeholders di pelabuhan perikanan. Target outcome yang ingin diraih dalam industrialisasi perikanan tangkap berbasis pemberdayaan nelayan di pelabuhan perikanan menyangkut empat hal utama, yakni:

- 1. Peningkatan Volume Produksi
- 2. Peningkatan Nilai Produksi
- 3. Peningkatan Pendapatan Nelayan
- 4. Penyerapan Tenaga Kerja (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2014).

Pembangunan Pelabuhan Perikanan harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga daya dukungnya guna menjamin tersedianya ruang yang memadai bagi kehidupan masyarakat (Adrianto, 2004). Juga melakukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menggunakan institusi kelembagaan dan instrumen lainnya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (Soerjani, J.S., R. Ahmad dan R. Munir, 1987).

Dengan adanya pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan diharapkan secara langsung ataupun tidak langsung memicu terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat (Idris, I., 2003). Pengaruh positif tersebut berasal dari berfungsinya pelabuhan sebagai sarana pelayanan di bidang perikanan dan jasa angkutan laut. Dalam hal ini, pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah pada sektor sumber daya dan lingkungan pesisir dan laut dapat digunakan tidak hanya sebagai dasar dalam memanfaatkannya tetapi juga dalam perlindungannya, sehingga pengaruh negatif terhadap ekosistem dapat ditekan sedini mungkin (Tapangan, T, 2001).

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas tentang target Outcome (DJPT, Kementrian KP, 2012) untuk pembangunan pelabuhan perikanan, menjadi suatu perumusan masalah dalam pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- Apakah pembangunan/pengembangan PPN Karangantu dapat meningkatkan volume dan nilai produksi Perikanan ?
- 2. Bagaimana pengaruh pembangunan/pengembangan PPN Karangantu terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat ?
- 3. Bagaimana dampak lingkungan dari pembangunan/pengembangan PPN Karangantu berdasarkan persepsi masyarakat sekitar?

Maka apakah permasalahan utama yang dikemukakan dalam hubungannya dengan pengaruh pembangunan PPN Karangantu mempunyai pengaruh positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya

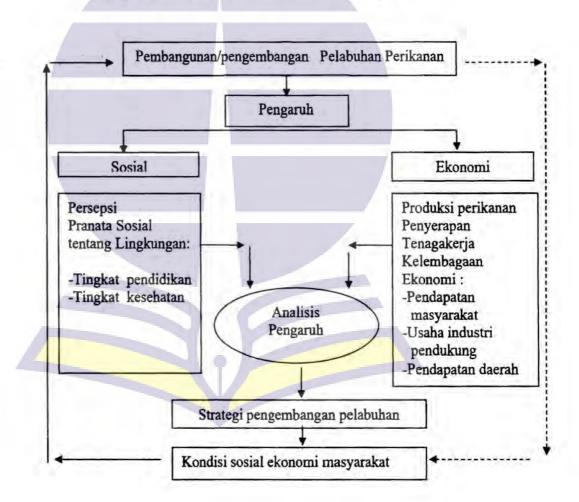
# C. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kegiatan pembangunan pelabuhan termasuk pelabuhan perikanan dapat memberikan pengaruh secara fisik yang berupa ancaman terhadap kerusakan ekologi baik berupa kerusakan lahan, biologi, geologi maupun pencemaran (Dahuri, 1996). Namun demikian, seperti umumnya pada setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan terjadi pula pengaruh sosial baik sosial budaya maupun sosial ekonomi, baik yang bersifat positif maupun negatif (Suratmo, 1998). Dengan demikian, pembangunan suatu lokasi pelabuhan

perikanan, baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan studi mengenai kelayakannya baik secara teknis, sosial ekonomi dan lingkungan.

Secara skematis kerangka pemikiran pentingnya kajian pengaruh pembangunan pelabuhan perikanan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, pada gambar 1.1 berikut ini

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kajian Pengaruh Pembangunan PPN Karangantu dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat



# D. Tujuan Penelitian

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk;

- Menganalisis tingkat Produksi Perikanan setelah adanya Pembangunan PPN Karangantu.
- Menganalisis pandangan subjektif (persepsi) masyarakat tentang pengaruh pembangunan pelabuhan perikanan terhadap lingkungan sekitar.
- Menganalisis Pengaruh Pembangunan PPN Karangantu terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan bagi masyarakat di sekitar lokasi PPN Karangantu.

# E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan serta sesuai dengan kerangka pemikiran dan tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pembangunan pelabuhan perikanan berpengaruh positip terhadap produksi hasil tangkapan yang didaratkan di Pelabuhan perikanan Nusantara Karangantu.
- Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan berpengaruh positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan.
- Masyarakat sekitar PPN Karangantu berpersepsi positif tentang
   Pembangunan PPN terhadap kondisi lingkungan sekitar.

# F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, antara lain untuk :

- Perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dan berkelanjutan.
- Diharapkan berguna bagi pemerintah terutama dalam memformulasi kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya.
- 3. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bahwa apakah terdapat perbedaan yang nyata pelabuhan perikanan Nusantara Karangantu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan pelabuhan perikanan.

#### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

# A. Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu terletak pada posisi koordinat 06° 02′ LS - 106° 09′ BT, pada awal perkembangannya adalah suatu desa pantai yang secara tradisional berkembang dari suatu kelompok pemukiman yang mendiami daerah dari areal lahan di muara kali Cibanten. Sejalan dengan perkembangan sejarah pemukiman nelayan, Karangantu tumbuh dan berkembang menjadi suatu pelabuhan nelayan yang cukup besar, dan berperan penting sebagai pusat kegiatan perikanan yang memasok sebagian besar kebutuhan ikan wilayah Propinsi Banten. (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP 2012)

Pada Tahun 1975/1976 Pelabuhan Perikanan Karangantu mulai dibangun di atas tanah seluas 2,5 Ha bertempat di Desa Banten kecamatan Kasemen dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/Org/5/1978 Tanggal 25 Mei 1978 secara resmi operasional dan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nama Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu. Seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan operasional pelabuhan maka pada Tanggal 30 Desember 2010 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.29/MEN/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan dimana didahului dengan dikeluarkannya Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 2 Desember 2010 Nomor:

B.3677/M.PAN-RB/12/2010 Tentang Usulan Penataan UPT di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga pada Tanggal 30 Desember 2010 tersebut Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu telah resmi berganti nama dan meningkat klasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan yang dijabarkan di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
No.10/MEN/2004 dijelaskan bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi
sebagai berikut:

- Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sarana
   Pelabuhan Perikanan;
- Pelayanan teknis kapal perikanan;
- Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
- 4. Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
- 6. Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan;
- Pengembangan dan pengolahan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya;
- 9. Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari;
- 10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam Tugas pokok dan fungsinya telah digariskan bahwa Pelabuhan Perikanan bertujuan:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan dalam rangka peningkatan produksi melalui penangkapan atau budidaya;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya atau budidaya;
- Memberikan pelayanan dalam kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan untuk mendapatkan nilai tambah;
- 4. Memberikan pelayanan dalam rangka mempermudah pendistribusian hasil tangkapan nelayan;
- 5. Meningkatkan pendapatan sekaligus peningkatan taraf hidup nelayan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah yang akurat dan tepat dalam menentukan segala kebijakan yang diperlukan. Dalam Rencana Strategik Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu telah ditentukan arah kebijakan yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan tersebut, sehingga dalam melaksanakan fungsinya Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dapat bekerja secara sistematis dan terarah sehingga diharapkan kinerja dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu itu sendiri terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun agar visi dan misi yang telah ditentukan dapat segera terwujud.

# B. Sejarah Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan dalam bentuk yang sangat sederhana sudah ada sejak dulu, terutama di pedesaan nelayan sepanjang pantai. Untuk menambatkan perahu dipakai tiang-tiang yang ditanam di tepi pantai dan bila air surut bahkan perahu

bentuk pelabuhan sederhana yang umumnya dimiliki perorangan disebut tangkahan dan di Jawa serta tempat lain dise but tempat pendaratan ikan. Bila diamati, kegiatan di tempat seperti itu cukup beragam dan penting seperti memuat bahan perbekalan (BBM, air, es, garam, bahan makanan, dan sebagainya) untuk keperluan ke laut, membongkar ikan hasil tangkapan untuk selanjutnya dijual, juga untuk menampung kegiatan perbaikan/perawatan mesin, alat tangkap dan kapal. Dengan demikian, walaupun kondisi pelabuhan perikanan hanya sederhana, namun keberadaannya sangat penting bagi nelayan (Anonimous, 2001).

Untuk memberi kemudahan pada nelayan dalam menjual hasil tangkapan, maka pada setiap pelabuhan dilengkapi dengan bangsal yang berfungsi untuk pelelangan ikan. Sistem lelang ini sudah ada sejak jaman Hindia Belanda terutama di pantai utara Jawa seperti Blanakan, Eretan, Dadap, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Juwana, Probolinggo, Pasuruan dan Muncar (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994).

Sejarah tumbuh kembangnya pelabuhan perikanan semula berupa tempat pelelangan ikan yang dibangun oleh pemerintah guna menunjang kegiatan koperasi perikanan laut (KPL) dan organisasi perikan an laut lainnya. Tempat pendaratan ikan tertua di Indonesia dibangun pada tanggal 26 Mei 1926 di Eretan Wetan Indramayu. Sejak saat itu sampai sesudah masa kemerdekaan tempat pendaratan ikan terus berkembang dengan sebutan Pangkalan Pendaratan Ikan (Anonimous, 1981).

Pembangunan prasarana perikanan dimulai sejak perubahan konsepsi pembangunan perikanan dari perikanan tradisional ke pengembangan perikanan modern yang berwawasan industri dengan mengikut sertakan nelayan, pengusaha dan perikanan rakyat atau nelayan tradisional dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ikan yang ada dan upaya mendorong peningkatan konsumsi ikan perkapita pertahun mutlak memerlukan pembangunan prasarana perikanan. Indikasi dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan ditandai dengan penyerahan pelabuhan di Pekalongan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Direktorat Jenderal Perikanan, melalui Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Perikanan No. DPP.2/57/13 23 Desember 1976, tentang Pengalihan Status H/II/2/6/20/76 tanggal Pengelolaan Pelabuhan Pekalongan menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan. Kemudian dilanjutkan pembangunan pelabuhan perikanan di berbagai lokasi, dengan sasaran menampung kegiatan kapal ikan yang ada serta pengembangan armada kapal ikan yang beroperasi di daerah Pantai, Laut Teritorial atau Laut Lepas dan ZEEI. Pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang pelaksanaannya "dimulai" dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun anggaran 1974/1975; dibangun 1 buah yaitu Pelabuhan Perikanan di Pekalongan
- Tahun anggaran 1975/1976; dibangun 8 buah Pelabuhan Perikanan di Sungai Liat, Tanjung Pandan (Belitung), Karangantu, Karimunjawa, Hantipan, Banjarmasin, Teluk Batang dan Bawean.
- Tahun anggaran 1976/1977; dibangun 3 buah Pelabuhan perkanan di Lampulo, Tarempa, Dagho
- Tahun anggaran 1977/1978; dibangun 6 buah Pelabuhan Perikanan di Pulau Tello, Sikakap, Pemangkat, Tarakan, Lombok, Kupang

- Tahun anggaran 1978/1979; dibangun 3 buah Pelabuhan Perkanan di Cilacap, Parigi, dan Belawan
- Tahun anggaran 1980/1980, dibangun 2 buah Pelabuhan Perikanan di Kejawanan (Cirebon) dan Brondong.

Dalam program peningkatan produksi perikanan laut perlu ditunjang dengan penyediaan Prasarana Pelabuhan Perikanan, disamping peningkatan sarana produksi lainnya, yang strategi pembangunannya dilakukan dengan pendekatan Teknis Ekonomis dan pendekatan Politis HanKamNas (Anonimous, 2002). Pelaksanaan pembangunan pendekatan Teknis Ekonomis dilaksanakan dengan memperhatikan dukungan potensi sumberdaya ikan, dan mendukung pembangunan wilayah, termasuk pembangunan desa pantai, serta menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, antara lain:

- Menampung dan melayani kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap trawl yang sedang berkembang;
- 2. Mendukung keberhasilan fungsi BUMN perikanan;
- Mendukung program transmigrasi nelayan khusunya di Kalimantan Barat,
   Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan (PP Teluk Batang, PP Hantipan dan PP Banjarmasin).

Pembangunan perikanan dengan pendekatan Politis Hankamnas dilaksanakan untuk mendukung keutuhan Wilayah Perairan Indonesia terutama yang berbatasan dengan Negara tetangga seperti PP Dagho di Sulawesi Utara, PP Pemangkat di Kalimantan Barat, PP Tarempa di Riau, PP Lampulo di Aceh dan PP Kupang di NTT (Anonimous, 2004). Kedepan, peran pelabuhan perikanan akan lebih ditingkatkan, tidak saja menunjang penyelenggaraan fungsi pelabuhan

perikanan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 18 UU No. 9 tahun 1985. Namun juga dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab secara keseluruhan termasuk pengelolaan perikanan yang disepakati melalui berbagai kerjasama atau perjanjian regional/internasional. Hal ini berarti pelabuhan perikanan haruslah yang memenuhi standar pelabuhan perikanan secara internasional dalam pengertian:

- 1. Memiliki sarana/prasarana yang memadai;
- 2. Menerapkan "good operation and management practice"
- 3. Terpeliharanya kebersihan dan sanitasi;
- Memadai sebagai " one-stop shopping fishing port " yang dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat nelayan/perikanan (Anonimous, 1981)

Tahun 2004, kebijakan Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap yaitu masih melanjutkan program pembangunan sebagai upaya pembinaan teknis terhadap Program pembangunan prasarana perikanan tangkap yang telah ditetapkan dan disusun secara kontinu dan berkelanjutan untuk memudahkan implementasi program agar mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan melalui anggaran Bagian Proyek Pengembangan Prasarana Perikanan Tangkap telah mengimplimentasikan program tersebut dalam bentuk kegiatan pokok antara lain Penyusunan Master Plan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Lingkar Luar (Outer Ring Fishing Port) Wilayah Indonesia (Anonimous, 1981).

Selanjutnya memperhatikan kondisi yang ada dan untuk mendukung program unggulan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2005, maka salah satu program utama Ditjen Perikanan Tangkap adalah "Pengembangan Prasarana

Perikanan Tangkap" melalui kegiatan "Revitalisasi Pelabuhan Perikanan untuk mempercepat pembentukan DKP Mini di Daerah" dan "Pengembangan Prasarana Perikanan Tangkap di Lingkar Luar Wilayah Indonesia (Outer Ring Fishing Port Development) "(Pelabuhan Perikanan, 2008).

Pilar kebijakan Pembangunan perikanan tangkap yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjawab VISI Pelabuhan Perikanan yaitu "Terwujudnya Pelabuhan Perikanan sebagai Pusat Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan beberapa misi yang antaranya adalah sebagai berikut (Pelabuhan Perikanan, 2008):

- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan operasional Pelabuhan Perikanan (pelayanan prima)
- 2. Mengembangkan sistem informasi pelabuhan perikanan
- Mengembangkan Pelabuhan Perikanan di lingkar luar wilayah Indonesian (Outer Ring Fishing Port Development/ORFPoD)
- 4. Mendukung pertumbuhan dan pengembangan Unit Bisnis Perikanan Terpadu
- 5. Membangun Pelabuhan Perikanan di daerah yang masih potensial dan wilayah perbatasan
- Memobilisasi dana pembangunan pada sektoral dan lintas sektoral di pelabuhan perikanan
- Memusatkan segenap kegiatan perikanan dan kelautan di Pelabuhan Perikanan (DKP Mini).

Dengan demikian, salah satu kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk memajukan kegiatan sektor kelautan dan perikanan dan merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan sesuai dengan misi Departemen Kelautan dan Perikanan adalah menyediakan prasarana perikanan yang memadai. Prasarana pelabuhan yang telah ada dan yang akan dibangun merupakan basis kegiatan pengadaan produksi perikanan di pantai dan menjadi pusat komunikasi antara kegiatan di wilayah laut dan wilayah daratan (Murdiyanto, B., 2003).

Pelabuhan perikanan akan menjadi pintu gerbang bagi usaha perikanan tangkap dan bagi masyarakat nelayan karena secara langsung maupun tidak langsung, prasarana pelabuhan berfungsi utama sebagai fasilitas yang menunjang seluruh kegiatan masyarakat nelayan dan ekonomi perikanan tangkap di wilayah tersebut. Perkembangan teknologi dan komunikasi akan meningkatkan hubungan dan transportasi antar daerah, antar pulau dan internasional yang akan memerlukan prasarana dan sarana pelabuhan yang lebih baik dan lebih modern (Anonimous, 2004).

#### C. Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Issue sentral pembangunan perikanan tidak lagi dititikberatkan pada peningkatan produksi perikanan, namun lebih dititikberatkan pada peningkatan sumberdaya manusia perikanan yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, utamanya nelayan. Adapun kebijakan umum prasarana perikanan tangkap (Anonimous, 2007-a) adalah:

 Berorientasi pada kepentingan nasional, dengan pengertian bahwa setiap kegiatan pembangunan perikanan harus memenuhi syarat sustainable development bagi seluruh lapisan masyarakat;

- 2. Berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan dan ekonomi masyarakat (seluruh stakeholder perikanan). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah bahwa pengembangan prasarana pelabuhan perikanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta tingkat kemampuan dan efisiensi;
- Pengembangan dan penataan Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PP/PPI) berdasarkan pada optimalisasi pemanfaatan SDI di 9 (sembilan) wilayah pengembangan (SK. Mentan, 1999)
- Menata PP/PPI guna optimalisasi pemanfatan sumberdaya perikanan laut dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi distribusi produk perikanan

# D. Konsepsi Pembangunan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Secara keseluruhan, pola pembangunan pelabuhan perikanan tersebut mencerminkan pelaksanaan konsep "Inti dan Plasma" yang dinamis dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Suatu Pelabuhan Perikanan Pantai sebagai inti, ditunjang oleh beberapa pusat pendaratan ikan sebagai plasmanya;
- Suatu Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai inti ditunjang oleh beberapa Pelabuhan Perikanan Panatai sebagai plasmanya;
- Suatu Pelabuhan Perikanan Samudera sebagai inti yang ditunjang oleh beberapa Pelabuhan Perikanan nusantara sebagai plasmanya;

Dalam pengembangan usaha perikanan dan Ketahanan Nasional, maka pembangunan prasarana perikanan ditujukan untuk:

- Pengembangan motorisasi di daerah-daerah padat nelayan yang harus diarahkan keperairan lepas pantai dan samudera dengan menggunakan kapal-kapal yang lebih besar.
- Daerah perairan di Indonesia Bagian Barat, merupakan daerah padat nelayan dengan pola pemasaran dalam negeri, sedangkan daerah Indonesia Bagian Timur dengan nelayan yang sedikit dengan pola pemasaran untuk eksport.
- Daerah yang dilihat dari segi strategi termaksud daerah rawan sehingga perlu dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan nasional.
- 4. Makin digalakkan program transmigrasi khususnya transmigrasi nelayan.

Dahuri dkk (1996) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang dilakukan sejak Pelita II s/d Pelita III didasarkan pada program pembangunan pelabuhan perikanan yang mempunyai prospek jangka panjang sesuai konsekwensi logis dan realisasi dari segenap kebutuhan masyarakat nelayan, oleh sebab itu secara prinsip pelabuhan perikanan merupakan "Social Utility" yang kepentingan-kepentingannya menyangkut hajad orang banyak, disamping sebagai "Social Overhead Capital (SOC) " untuk menunjang dan mendorong berkembangnya usaha perikanan baik penangkapan, pengolahan maupun pemasaran hasil-hasil perikanan.

Pembangunan berkelanjutan menurut Haryadi dan Setiawan (1995), tidak berarti tidak ada pembangunan atau pertumbuhan. Dikatakannya juga tidak setiap pendekatan pembangunan berkelanjutan perlu untuk memiliki kesamaan asumsiasumsi, perlu beberapa prinsip dasar untuk mencapai pembangunan yang benarbenar berkelanjutan.

Mengurangi limbah, melakukan daur ulang limbah, dan menerapkan pembuangan limbah yang aman bagi lingkungan. Dan akhirnya semua kegiatan harus diukur dampak jangka panjangnya bagi lingkungan dan bukan sekedar pencapaian-pencapaian masa kini semata (Damopilii, 1996).

# E. Landasan Hukum Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Perikanan

- 1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Keputusan Mentan No. 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang Tata Hubungan Kerja UPT PP dengan instansi terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.18/MEN/SJ/2001 tentang Penyerahan 13 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ke Pemerintah Daerah
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.26.I/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.46/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
- 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung;
- 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.10/MEN/2005 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bacan, Tobelo, Kwandang, Sadeng dan Tumumpa;
- 13. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara RI No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penataan Organisasi UPT di Lingkungan DKP.
- 14. PERDA-PERDA bagi Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan oleh PEMDA
- 15. Permen KP No. PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- 16. Kepmen KP No. KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

# F. Fungsi, Peranan dan Kriteria Pelabuhan Perikanan

Fungsi dan peranan pelabuhan perikanan meliputi pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan kapal-kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan, tempat pelaksanaan pengawasan sumber daya ikan (Lubis, 2002). Di lain pihak, fungsi dan peranan pangkalan pendaratan ikan meliputi berbagai aspek sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan bongkar muat kapal-kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil tangkapan, pusat pelaksanaan dan pengumpulan data. Sedangkan pelabuhan perikanan memegang peranan penting khususnya sebagai pusat untuk mensuplay secara kontinyu bahan makanan sumber protein hewani untuk manusia, dan stabilisator kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional, serta sebagai pusat kehidupan masyarakat nelayan dan merupakan akivitas industri perikanan, dengan aktivitasnya meliputi:

- 1. Sebagai pusat aktivitas produksi
- 2. Sebagai pusat distribusi
- 3. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan

Menurut Departemen Perhubungan, pelabuhan perikanan sebagai pelabuhan khusus adalah suatu wilayah perpaduan antara daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai dengan didistribusikan. Sejalan

dengan itu, Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian Republik Indonesia (sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan) mendefiniskan; pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasaran (Murdiyanto, 2003).

Fungsi dan peranan pelabuhan perikanan meliputi :

- 1. Pusat pengembangan masyarakat nelayan
- 2. Tempat berlabuh kapal perikanan.
- 3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan,
- 4. Tempat untuk memperlancar kegiatan kapal-kapal perikanan,
- 5. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan,
- 6. Pusat pelaksanaan pembinaa mutu hasil perikanan,
- 7. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan

Di lain pihak, fungsi dan peranan pangkalan pendaratan ikan meliputi berbagai aspek sebagai berikut :

- 1. Pusat pengembangan masyarakat nelayan
- 2. Tempat berlabuh kapal perikanan,
- 3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan,
- Tempat untuk memperlancar kegiatan bongkar muat kapal-kapal perikanan,
- 5. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan,
- 6. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil tangkapan,
- 7. Pusat pelaksanaan dan pengumpulan data.

Pengklasifikasian pelabuhan umumnya ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. Menurut Lubis (2002), bahwa kriteria-kriteria tersebut antara lain :

- 1. Luas lahan, letak dan jenis konstruksi bangunannya.
- 2. Tipe dan ukuran kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan
- 3. Jenis perikanan dan skala usahanya
- 4. Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

Sesuai dengan bobot kerja, produktivitas, kapasitas sarana serta rencana pengembangannya, pelabuhan perikanan dibedakan menjadi 4 tipe sesuai dengan Peraturan Menteri Kelauatan dan Perikanan tahun 2006, pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Klasifikasi PP menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.16/MEN/2006

No	Kriteria Pelabuhan	PPS	PPN	PPP	PPI
1	Daerah operasional kapal ikan yang dilayani	Wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Esklusif (ZEEI) dan perairan internasional	Perairan ZEEI dan laut teritorial	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial,	Perairan pedalaman dan perairan kepulauan
2	Fasilitas tambat/labuh untuk ukuran kapal perikanan	>60GT	30-60 GT	10-30GT	3-1 GT
3	Panjang dermaga dan kedalaman kolam	>300 m dan >3 m	150-300 m dan >3 m	100m dan >2 m	50m dan > 2m
4	Kapasitas menampung kapal	>6000 GT (ekivalen dengan 100 buah kapal berukuran 60 GT)	>2250 GT (ekivalen dengan 75 buah kapal 30 GT)	>300 GT (ekivalen dengan 30 buah kapal 10 GT)	>60GT (ekivalen dengan 20 buah kapal dengan 3 GT)
5	Volume ikan yang didaratkan	Rata-rata 60 ton/hari	Rata-rata 30 ton/hari	-	-
6	Ekspor ikan	Ya	Ya	Tidak	Tidak
7	Luas lahan	>30ha	15-30 ha	5-15 ha	2-5 ha
8	Fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan	Ada	Ada/tidak	Tidak	Tidak

No	Kriteria Pelabuhan	PPS	PPN	PPP	PPI
9	Tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembanga n industri perikanan	Ada	Ada	Tidak	Tidak

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006

# G. Operasional Pelabuhan Perikanan

Kebijakan operasional pelabuhan perikanan telah dipersiapkan sebelumnya.

Pola pengelolaan pelabuhan perikanan, terdiri dari beberapa pokok yaitu:

- 1. Pengelolaan pelabuhan harus jelas berada di bawah Departemen Pertanian
- Organisasi pembinaan pelabuhan dikaitkan dengan kegiatan pelabuhan, kegiatan pemasaran dan kegiatan kesejahteraan nelayan ditinjau dari aspek sarana dan pengaturan.
- 3. Kewenangan pembangunan pelabuhan perikanan berada di tangan Pemerintah Pusat (Departemen Pertanian) dimana di dalam pengelolaannya dapat diserahkan kepada :
  - a. Pemerintah Daerah (untuk Pelabuhan Perikanan Pantai)
  - b. Koperasi (untuk Pelabuhan Perikanan Pantai)
  - c. Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Perum atau Perjan (untuk Pelabuhan Perikanan Samudera dan Nusantara)
- 4. Pola pembiayaan dalam rangka investigasi pembangunan pelabuhan yang telah diatur :
  - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Samudera:
    - 1) Investasi dari Pemerintah Pusat
    - Dalam hal manajemen dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, investasi dari kredit bank, subsidi pemerintah 50% yang klasnya

untuk pembangunan basic fasilitas karana tetap dimiliki oleh Pemerintah

# b. Pelabuhan Perikanan Pantai:

1) Manajemen dilakukan oleh Pemerintah Daerah/koperasi, maka investasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan sarana penunjang oleh Pemerintah Daerah/Koperasi. Bila kemampuan Pemerintah Daerah terbatas maka penyediaan sarana dapat disubsidi dari Pemerintah Pusat maximal 50% untuk pembangunan sarana penunjang.

Biaya eksploitasi untuk Pelabuhan Perikanan yang diusahakan yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Samudera dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (Perum dan Perjan) harus tunduk pada ketentuan IBW. Disamping itu untuk mencapai misi dan tujuan pembangunan pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan tersebut secara operasional akan dijabarkan dalam bentuk beberapa program dan rencana aksi pada Direktorat Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelabuhan Perikanan dengan program
  Peningkatan Operasional Pelabuhan Perikanan (PP) dan program
  Revitalisasi Pelabuhan Perikanan
- 2. Optimalisasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)
- 3. Implementasi Outer Ring Fishing Port Development (ORFPoD)
- 4. Implementasi Unit Bisnis Perikanan Terpadu di PP
- 5. Pembangunan PP di wilayah Potensial dan Wilayah Perbatasan
- 6. Implementasi Dermaga Terapung (Fisheries Floating Services)
- 7. Perluasan Dukungan Lintas Sektor dan Subsektor

#### BAB III METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (PPN) Karangantu, Propinsi Banten. Penelitian lapangan ini dilakukan selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari 2013 hingga Juni 2013 dengan rincian tempat dan waktu penelitian dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Tempat dan Waktu Penelitian

No	Rincian	Tempat	Waktu
1	Penyusunan Proposal Tesis	Perpustakan UT, Perpustakan IPB, KKP-RI	Januari- Februari
2	Penelitian Lapangan		
	-Pengumpulan Data Primer (Kuisioner)	PPN Karangantu, Banten	Februari
	-Data Sekunder	PPN Karangantu, KKP RI	Februari- Maret
3	Pengolahan Data	UT	Maret-April
4	Penyelesaian Tesis	UT	April-Juni

# B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan studi lapangan/kasus.

Pendekatan ini digunakan dengan tujuan mengintegrasikan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan PPN Karangantu terhadap sistem alam dan sistem sosial (manusia) yang ada di PPN Karangantu. Sistem sosial atau manusia dikaji melalui pendekatan studi terkait dengan persepsi dan indikator sosial ekonomi masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi dan berdomisili di sekitar PPN Karangantu Serang Banten. Hasil kajian dianalisis secara deskriptif, sehingga

menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan di wilayah Banten. Sehingga dengan pendekatan studi lapangan maka penelitian ini termasuk kepada metode penelitian kualitatif. Batasan ruang lingkup penelitian yaitu meneliti dampak adanya pembangunan PPN Karangantu terhadap Peningkatan kegiatan sosial ekonomi di PPN Karangantu dan dampak terhadap lingkungan berdasarkan Persepsi masyarakat yang berada dan melakukan aktifvitas di PPN Karangantu.

### C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilakukan termasuk metode penelitian kuantitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa Data Primer dan Data Sekunder, Data Primer diperoleh dengan cara wawancara dengan menggunakan kuisioner. Sedangkan Data Sekuder yang diperoleh dari data-data yang tercatat di PPN Karangantu terkait dengan Laporan Tahunan, Data Produksi Perikanan dan lainnya yang terkait dengan kajian ini. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara studi lapang/ survey lapangan ke lokasi studi di PPN Karangantu. Kemudian data yang diperoleh diolah dan diinterprestasikan secara deskriptif.

#### 1. Penetapan Responden

Masyarakat sekitar pelabuhan secara keseluruhan merupakan masyarakat nelayan yang berdiam dan mencari nafkah di sekitar wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Penetapan responden dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan tujuan dari studi dan berdasarkan keputusan

peneliti dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Kriteria responden yang diambil untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- Masyarakat tinggal dan beraktivitas di sekitar PPN selama minimal 5
   tahun (Singarimbun dan Effendi, 1989).
- b. Mencari mata pencaharian di sekitar PPN Karangantu
- c. Mempunyai mata pencaharian sebagai Nelayan, Pedagang ikan, Buruh angkut ikan, pengolah hasil perikanan, tukang ojeg, pedagang warung, dan buruh bengkel kapal/dok/pabrik es.

Responden yang pertama kali diwawancarai ditetapkan melalui bantuan konsultasi terhadap petugas PPN. Untuk responden berikutnya ditetapkan melalui teknik snowball (Wahyono, 2001). Dalam teknik snowball, penetapan responden berikutnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil informasi yang didapatkan dari responden yang pertama. Kriteria responden yang diambil yaitu yang mempunyai mata pencaharian sebagai berikut: 1) Nelayan, 2) Pedagang ikan, 3) Buruh angkut ikan (tenaga bongkar muat), 4) Pengolah hasil perikanan, 5) Tukang ojeg, 6) Pedagang warung dan 7) Buruh bengkel kapal/dok/pabrik es, dimana jumlah masing responden sebanyak 5 orang sehingga jumlah responden 30 orang. Dan jumlah responden Nelayan berdasarkan jenis peralatan tangkap (ada 4 jenis alat tangkap utama) masingmasing 5 orang sehingga jumlah responden 20 orang berdasarkan kepemilikan alat tangkap, sehingga total keseluruhan responden menjadi 50 orang.

Disadur dari Sugiyono (2009) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2009:90) memaparkan menurut Roscoe dalam buku

Research Methods For Business (1982:253) memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelirian antara lain: Ukuran sampel yang layak untuk penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Jadi jumlah responden sebanyak 50 orang dalam penelitian ini masih dapat dikatakan layak.

### 2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data PPN Karangantu adapun instrumen data yang dicari yaitu:

- a. Gambaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu:
  - 1) Profil Pelabuhan Perikanan Karangantu,
  - 2) Kegiatan Sosial Ekonomi di PPN Karangantu:
    - i. Frekuensi Kunjungan Kapal ke PPN Karangantu
  - ii. Jumlah Nelayan di PPN Karangantu,
  - iii. Kegiatan Perbengkelan
  - iv. Jasa Pelayanan Es
  - v. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

#### b. Produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Pengumpulan data sekunder dilakukan pada masing-masing instansi terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Serang, Banten, Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sedangkan Data primer dilakukan dengan cara survei pengumpulan data dilakukan menggunakan cara wawancara dengan panduan kuesioner.

Instrument data yang dikumpulkan berupa:

- a. Persepsi masyarakat terkait pengaruh pembangunan PPN terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar PPN.
  - 1) Kondisi Kebersihan Perairan
  - 2) Kondisi Bau
  - 3) Kondisi rasa air minum
  - 4) Kondisi warna air termasuk air minum
  - 5) Kondisi Sampah
  - 6) Kondisi Limbah Perikanan
  - 7) Kondisi MCK
  - 8) Kondisi tempat tinggal masyarakat
- b. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan Pelabuhan perikanan terhadap penyerapan tenaga kerja
- Pengaruh peningkatan pendapatan masyarakat sekitar PPN sebelum dan sesudah pembangunan PPN Karangantu.

Data sekuder dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif sedangkan data primer yang diperoleh diolah dengan menggunakan skala likert dan dianalisis secara deskriptif.

### 3. Metode Analisis Data

### a. Persepsi

Keseluruhan data sosial ekonomi masyarakat dianalisis, secara deskriptif (tabulasi dan persentase) dan statistik (Nazir, 1988). Pengujian yang dilakukan terhadap variabel yang merupakan penyusun unsur-unsur kondisi lingkungan secara keseluruhan (dalam hal ini terdiri kebersihan perairan, bau, rasa air minum, warna air, sampah, limbah perikanan, MCK,

kondisi tempat tinggal masyarakat sekitar). Pengujian yang sama juga dilakukan untuk penyerapan tenaga kerja diantara kelompok masyarakat yang berpendapat yang merupakan penyusun unsur-unsur yang mewakili masyarakat sekitar PPN (dalam hal ini terdiri kelompok masyarakat nelayan, pedagang ikan, buruh angkut ikan, pengolah hasil perikanan, tukang ojeg, pedagang warung dan buruh bengkel kapal/dok/pabrik es). Namun demikian, terlebih dahulu dilakukan tranfer data yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif dengan cara memberikan skor (nilai) yang konsisten menurut penskalaan Likert yaitu dengan interval yang sama pada setiap kategori. Semakin membaik diberi skor 3, tidak berubah diberi skor 2, Semakin buruk diberi skor 1 dan tidak mengetahui diberi skor nol. Kemudian data Persepsi dibahas secara deskriptif.

Tabel 3. Skala Likert untuk Persepsi

	Time Walk	Nillary
0	Tidak tahu	0
1	Semakin Buruk	1
2	Tidak berubah	2
3	Semakin Baik	3

Pengaruh Pembangunan Pelabuhan perikanan terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar PPN

Pengumpulan data untuk Instrument Pengaruh diperoleh dengan pengukuran skala likert dimana interval pengukuran yaitu meningkat diberi skor 3, tidak berubah diberi skor 2, menurun diberi skor 1 dan tidak mengetahui diberi skor nol.

Tabel 4. Skala Likert untuk Pengaruh

	· Skala interval	Nilai:
0	Tidak tahu	0
1	Menurun	1
2	tidak berubah	2
3	Meningkat	3

Dimana kompenen pertanyaan yang diberikan untuk varibel dependen (varibel dipengaruhi/terikat), yaitu :

- Pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja akibat pembangunan PPN Karangantu
- Pengaruh terhadap peningkatan pendapatan akibat pembangunan
   PPN Karangantu

Pengaruh Pembangunan Pelabuhan perikanan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar PPN.

Untuk menguji perbedaan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah pembangunan PPN Karangantu, data diperoleh dengan pertanyaan terhadap responden tentang Pendapatan rata-rata sebulan sebelum dan sesudah pembangunan PPN karangantu.

Kemudian untuk menganalisis data tersebut digunakan uji statistik thitung dengan menggunakan Paired Sample T-Test. Rumus yang digunakan adalah (Soejoeti Zamzawi, 2005); (Siegel, S,1997)

$$t - \frac{d - do}{Sd/n}; v - n - 1$$

#### Dimana:

d = rata-rata tingkat pendapatan sesudah - sebelum pembangunan

Sd = standar deviasi

n = jumlah observasi

v = derajat bebas

Hipotesis awal menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah pembangunan. Sedangkan untuk hipotesis akhir terdapat perbedaan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembangunan atau dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ho: 
$$\mu 1 = \mu 2$$
 atau  $\mu D = \mu 1 - \mu 2 = 0$ 

H1: 
$$1 > \mu 2$$
 atau  $\mu D = \mu 1 - \mu 2 > 0$ 

#### Dimana:

μ1 = pendapatan sebelum pembangunan PPN Karangantu

μ2 = pendapatan sesudah pembangunan PPN Karangantu

Kriteria Uji:

Ho ditolak apabila t-hitung > t-tabel, db = n-1  $\alpha$  = 0,05

Ho diterima apabila t-hitung < t-tabel, db = n-1  $\alpha$  = 0,05

Analisis data dilakukan dengan bantuan software komputer yang sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan analisis data, sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang akurat dan memudahkan dalam interpretasi secara deskriptif. Penggunaan α = 0,05 karena tingkat kepercayaan pada peneliti pada penelitian ini cukup besar dan jumlah responden yang diambil tidak banyak.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Pada Tahun 1975/1976 Pelabuhan Perikanan Karangantu mulai dibangun di atas tanah seluas 2,5 Ha bertempat di Desa Banten kecamatan Kasemen dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/Org/5/1978 Tanggal 25 Mei 1978 secara resmi operasional dan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nama Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu. Seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan operasional pelabuhan maka pada Tanggal 30 Desember 2010 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.29/MEN/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan dimana didahului dengan dikeluarkannya Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 2 Desember 2010 Nomor: B.3677/M.PAN-RB/12/2010 Tentang Usulan Penataan UPT di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga pada Tanggal 30 Desember 2010 tersebut Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu (PPP Karangantu) telah resmi berganti nama dan meningkat klasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (PPN Karangantu).

#### 1. Visi dan Misi

Sumberdaya ikan dalam pemanfaatannya apabila dikelola secara tidak profesional maka akan semakin berkurang dan bahkan akan habis dengan sendirinya. Sejalan dengan hal tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara

Karangantu terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan untuk meningkatkan produksi hasil perikanan sampai kependistribusian hasil tangkapannya. Sejalan dengan hal tersebut, maka Visi yang akan diwujudkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu selama periode tahun 2009 – 2014 adalah "Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Perikanan Terpadu tahun 2015". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu adalah sebagai berikut

- a) Mengelola sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan
- b) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan
- c) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana dan prasarana pelabuhan
- d) Mengembangkan usaha perikanan tangkap yang berdaya sain

# 2. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi seperti itu, maka tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu yang ingin dicapai selama periode Tahun 2009-2014 adalah :

- a) Memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan
- c) Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan operasional pelabuhan perikanan
- d) Meningkatkan kesempatan dan ruang usaha bagi pelaku perikanan

Sedang sasaran yang diharapkan tercapai dalam kurun waktu tersebut adalah :

- a) Meningkatnya Produksi dan Nilai Produksi hasil perikanan
- b) Meningkatnya Tingkat kesadaran masyarakat nelayan dalam menjaga kerusakan sumberdaya perikanan
- c) Meningkatnya diversifikasi usaha perikanan
- d) Meningkatnya kwalitas dan kompetensi SDM Masyarakat Nelayan
- e) Meningkatnya produktivitas dan daya saing masyarakat nelayan
- f) Meningkatanya Jumlah dan kualitas fasilitas PPN Karangantu
- g) Meningkatnya Jumlah Masyarakat nelayan serta stake holder perikanan lainnya yang memanfaatkan fasilitas PPN Karangantu
- h) Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak
- i) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di PPN Karangantu
- j) Meningkatnya export dan nilai export hasil perikanan tangkap
- k) Tumbuhnya kegiatan ekonomi penunjang lainnya

# B. Kegiatan Sosial Ekonomi di PPN Karangantu

Sebagai suatu proses, manajemen atau pengelolaan suatu urutan pelaksanaa n yang amat logis, digambarkan ada tindakan pengelolaan yang semata-mata diarahkan pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Jika seluruh kegiatan diilustrasikan sebagai bentuk input, proses dan output, maka sumberdaya yang tersedia adalah input, fungsi-fungsi pengelolaan sebagai proses dan tujuan adalah sebagai output. Dengan demikian, pelabuhan perikanan merupakan prasarana yang disiapkan pemerintah guna mempermudah berkembangnya kegiatan ekonomi

perikanan. Khusus untuk menunjang peningkatan produksi dan pendapatan nelayan. Untuk menunjang fungsi tersebut, maka pelabuhan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kemudian, untuk mengelola fasilitas tersebut diperlukan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu atau yang memiliki pengetahuan sesuai dengan fasilitas yang dikelolanya (Danuningrat, 1977).

Dalam hubungannya dengan pembangunan dan pengembangan daerah, maka pelabuhan perikanan dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan kegiatan perikanan tangkapnya. Dalam hal ini, daerah yang berkembang pesat kegiatan perikanannya mempunyai tipe pelabuhan yang lebih tinggi yaitu mulai dari pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan nusantara, dan pelabuhan perikanan pantai (Tapangan, 2001).

Dalam tugas pokok dan fungsinya, setiap pelabuhan perikanan mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada masyarakat perikanan dan pembangunan daerah perikanan. Kemudian, dalam tata cara kerja pelabuhan perikanan terkandung pengertian apa yang seharusnya dikerjakan para petugas lingkup pelabuhan perikanan. Hal ini antara lain menyangkut tata tertib pelayan kapal di pelabuhan perikanan, tata cara penggunaan sarana pelabuhan perikanan, pengaturan lalu-lintas barang dan orang, serta penyelenggaraan keamanan dan kebersihan (Kramadibrata, 1985).

Sejak awal operasionalnya pada tahun 1975, pengelolaan pelabuhan perikanan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan. Sistem administrasi keuangan di pelabuhan perikanan berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (UUPI/ICW). Semua kebutuhan biaya untuk mengoperasionalkan pelabuhan perikanan diperolah dari APBN, sedangkan

pendapatan yang diperolah harus disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Dahuri, 2004).

Mengingat sifat kegiatannya berorientasi kepada pelayanan umum, maka bentuk badan usaha yang paling sesuai untuk mengusahakan pelabuhan perikanan adalah perusahaan umum (Perum). Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1990 pasal 3 dinyatakan bahwa hanya 9 pelabuhan perikanan untuk sementara yang diusahkan oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera.

### 1. Keragaan PPN Karangantu

Keragaan pembangunan PPN Karangantu meliputi:

- a) Pelaksanaan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan (SIPP)
- b) Pelayanan Jasa Pelabuhan
- c) Pendaratan Ikan
- d) Pelayanan Pas Masuk Pelabuhan
- e) Pemanfaatan Balai Pertemuan Nelayan
- f) Frekuensi Kunjungan Kapal Ke PPN Karangantu
- g) Jenis Alat Tangkap
- h) Masyarakat Nelayan
- i) Kegiatan Perbengkelan
- j) Investasi Di PPN Karangantu
- k) Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran & Respon Balik Peta Fishing Ground
- 1) Kesyahbandaran Di PPN Karangantu
- m) Pengawasan Sumberdaya Ikan
- n) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

o) Pelaksanaan Kegiatan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5)

Pengaruh pembangunan terhadap kondisi sosial ekonomi oleh Haeruman (1979) disebutkan bahwa perubahan atau pengaruh tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga sosial yang seringkali menimbulkan keresahan sosial yang gawat, yang terjadi karena kurangnya pendekatan yang serasi terhadap masyarakat di sekitar proyek.

# 2. Frekuensi Kunjungan Kapal Ke PPN Karangantu

Pada Tahun 2006 jumlah kapal yang masuk dan berlabuh di Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu mengalami peningkatan yaitu sebanyak 17.505 kali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak begitu signifikan hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang antara lain : dengan semakin meningkatnya BBM biaya operasional kapal untuk ke laut mengalami peningkatan sehingga menyebabkan nelayan semakin sulit untuk kelaut, sehingga untuk menyikapi hal tersebut para nelayan tersebut menggunakan bahan bakar oplosan antara solar dan minyak tanah namun demikian hal ini bukanlah menjadi pemecahan permasalahan yang baik karena akibat penggunaan bahan bakar oplosan tersebut maka mesin yang digunakan cenderung akan cepat rusak sehingga menambah beban biaya operasional lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu penerapan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Salah satu teknologi tersebut adalah teknologi biodisel yang saat ini sedang giat dilakukan pengkajiannya. Sehingga diharapkan adanya teknologi tersebut dapat membantu meringankan beban nelayan baik dari penyediaan sarana dan manfaat yang akan ditimbulkan nantinya.

Dari Tabel 5. juga terlihat bahwa kapal-kapal yang masuk di Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu masih didominasi oleh kapal-kapal yang berukuran dibawah 10 GT. N amun demikian ada juga kapal-kapal yang berukuran diatas 50 GT yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu baik itu melakukan kegiatan tambat labuh ataupun melakukan kegiatan pengedokan. Hal ini menandakan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal yang berukuran kecil namun juga dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal yang berukuran 50 GT keatas sehingga diperlukan upaya-upaya dan pemikiran dalam hal pengembangan dari status Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu kedepanya. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa perahu tanpa motor yang ada selama ini sudah dapat menggunakan mesin penggerak sehingga terjadi peningkatan status dari perahu tanpa motor menjadi perahu bermotor. Frekuensi kedatangan Kapal yang mendarat di Pelabuhan Pantai Karangantu Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 5.

# 3. Jumlah Nelayan PPN Karangantu

Sejak Pelabuhan Perikanan dibangun Tahun 1975/1976 masyarakat perikanan yang melakukan usaha perikanan di Lingkungan PPP Karangantu diantaranya nelayan, pemilik kapal, penjual ikan dsb. Adapun nelayan yang melakukan aktivitas selama lima tahun seperti yang tertera pada Tabel 6.

Tabel 5. Frekwensi Kedatangan Kapal Yang Mendarat di Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu Tahun 2008 - 2012. (Satuan= Kali)

F	Kategori da perahu/		2008	2009	2010	2011	2012
Jumla	h / <i>Total</i>		20.823	23.289	24.633	25.265	22.528
	Sub jumla	ıh	0	0	0	0	0
notor	Jukung		-	-	-	-	-
ıpa n	Papan	Kecil	-	-	-	-	-
u tan	perahu 🤳	Sedang	-	-	- \	-	-
Perahu tanpa motor	rakit Boat	Besar	-		-	-	-
	Sub jumla	ıh	20.823	23.289	24.633	25.265	22.528
	Motor temple		12.071	12.898	13.580	13.419	12.353
otor		Sub Jumlah Kapal Motor	8.752	9.989	4.700	6.258	6.532
al m	otor	< 5 GT	5.835	7.365	3.639	4.505	4.483
Жар	al mo	5 – 10 GT	2.385	3.626	3.949	4.314	3.211
Perahu/Kapal motor	Ukuran kapal motor	10 – 20 GT	-	96	25	30	16
Pe	curan	20 – 30 GT	-	4	30	27	12
	Ď	30 – 50 GT	-	1	9	5	14
	4	50 – 100 GT	305	-	4	-	1

Tabel 6. Jumlah nelayan yang melakukan aktivitas di PPP Karangantu

NO	TAHUN	JUMLAH NELAYAN
1	2008	1.505
2	2009	1.614
3	2010	1.822
4	2011	2.433
5	2012	2.481
Kenai	kan Rata-rata (%)	11,30

Pada Tabel 6 menunjukkan jumlah nelayan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 di Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu mengalami fluktuasi. Secara umum rata-rata jumlah nelayan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 meningkat

sebanyak 11,30 % sedangkan jumlah nelayan pada tahun 2006 sebanyak 2.481 orang.

## 4. Kegiatan Perbengkelan

Pada Tahun 2012 peralatan bengkel di PPP karangantu terus diupayakan kelengkapannya, upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas layanan kepada masyarakat nelayan yang hendak melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin kapal mereka. Adapun kegiatan perbaikan tersebut seperti pada tabel berikut. Dari Tabel 7 terlihat bahwa kegiatan pelayanan bengkel di PPP Karangantu mengalami kenaikan tidak begitu signifikan hal ini disebabkan karena kegiatan nelayan yang masih terpuruk akibat imbas dari kenaikan BBM.

Berdasarkan Tabel 7 kenaikan kegiatan pelayanan Bengkel di PPN Karangantu dengan rata-rata peningkatan sebesar 33,81%, hal ini menunjukkan peningkatan positif terhadap kegiatan perbengkelan di PPN Karangantu.

Tabel 7. Jumlah Kegiatan Pelayanan Bengkel di PPN karangantu

No	Tahun	Nilai (Rp)
1	2008	6.445.000
2	2009	4.325.000
3	2010	4.285.000
4	2011	11.837.000
5	2012	15.840.000

Sumber: Laporan Tahunan PPN Karangantu 2012

#### 5. Jasa Pelayanan Es

Pabrik es di PPN Karangantu dibangun pada Tahun 1976 diatas lahan seluas 240 M² dan mulai beroperasi tahun 1978. Didalam perkembangan operasionalnya telah melalui banyak kendala baik teknis maupun non teknis serta dalam kurun waktu tersebut juga mengalami beberapa perbaikan ataupun

perubahan. Pada tahun 2012 ini Pabrik Es PPN Karangantu tidak dapat beroperasi secara penuh, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan bahan bakar solar subsidi sebagai bahan bakar utama dalam operasional pabrik es sehingga menjadi kendala yang dapat menghambat operasional pabrik es di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka PPN Karangantu melakukan terobosan yakni penggantian penggunaan mesin tenaga diesel yang berbahan bakar solar menjadi mesin bertenaga listrik.

Pabrik es PPN Karangantu memiliki kapasitas mesin terpasang sebesar 30 ton perhari namun kemampuan produksi hanya 13 ton perhari, dimana masih jauh dibawah kemampuan mesin terpasang. Sejak dimulai operasinya pabrik es tahun 1978, pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan hanya sebatas kegiatan pemeliharaan dan pengantian peralatan yang sudah tua, tidak mengarah pada penambahan kemampuan produksi sedangkan kebutuhan masyarakat perikanan di PPN Karangantu terhadap es semakin tinggi yakni kurang lebih 40 ton perhari. Menyikapi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan pabrik es di PPN Karangantu. Secara keseluruhan penyaluran es di PPN Karangantu tahun 2012 berasal dari luar pelabuhan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8 Penyaluran Es Balok Tahun 2012

		Jumlah Pen	yaluran Es (Ton)	
No	Bulan	Dalam Pelabuhan	Luar Pelabuhan	Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 39,52 13,35 12,85 29,95	295,40 178,05 139,55 206,23 218,45 472,26 300,08 318,90 220,38 225,08 279,95 90,35	295,40 178,05 139,55 206,23 218,45 478,99 300,08 318,90 259,9 238,43 292,8 120,30
	Jumlah	102,40	2.944,68	3.047,08

Sumber: Laporan Tahunan PPN Karangantu 2012

## 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dasar Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu menggunakan PP. No. 62 Tahun 62 Tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 November 2002.

Pada Tahun Anggaran 2012 target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu sebesar Rp. 49.879.000 dengan realisasinya yang tercapai sebesar Rp. 69.072.289,- dengan perincian dapat lihat Tabel 9. Pada tabel terlihat bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak pada PPN Karangantu tahun 2011 sebesar Rp. 43.641.909,- dibanding dengan penerimaan tahun 2012 sebesar Rp. 69.072.289,- yang telah di tetapkan

menunjukkan bahawa PNBP PPP Karangantu pencapaian targetnya sebesar 58,27 %.

Tabel 9. Perincian Penerimaan Negara Bukan Pajak

NO	URAIAN PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	PENERIMAAN/ PENYETORAN (Rp.)
1.	Sewa Kios/Bangunan	840.000	320.000
2.	Permanen	1.704.000	964.800
3.	Sewa Bangunan Semi	1.440.000	820.000
4.	Permanen	160.000	700.000
5.	Sewa Guest	23.400.000	16.880.000
6.	House/Mess/Wisma	1.400.000	4.064.000
7.	Sewa Aula/Ruang Rapat	4.800.000	15.840.000
8.	Penjualan Es	8.923.000	7.759.200
9.	Jasa Air Bersih	840.000	1.517.500
10.	Jasa Bengkel	720,000	8.685.624
11.	Jasa Pas Masuk Pelabuhan	1.200.000	2.150.600
12.	Jasa Tambat Labuh	4.452.000	5,194,900
13.	Jasa Listrik	-	-
14.	Jasa Keranjang	-	2.967.665
15.	Sewa Tanah/Pemeliharaan	-	473.000
16.	Sewa Pemeliharaan SPDN	1	735.000
17.	Sewa Rumah Dinas		
	Sewa Pasar Ikan		
	Sewa Mesin Penghancur Es		
Juml	ah	49.879.000,-	69.072.289,-

Sumber: Laporan Tahunan PPN Karangantu 2012

# C. Produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Dalam statistik disebutkan bahwa data produksi mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan, dijelaskan juga yang tidak termasuk data produksi adalah:

 Data produksi ikan hasil penangkapan yang ditangkap dalam rangka sport/olah raga dan rekreasi atau kegemaran (hobbi) 2. Data produksi tidak mencakup hasil penangkapan yang dibuang kelaut segera setelah ikan/binatang air lainnya/tanaman air tertangkap.

Pendataan hasil tangkapan di PPN Karangantu terlihat pada Tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10. Produksi dan Nilai Ikan Produksi PPN Karangantu Tahun 2002-2012

	Pendar	atan ikan	Perse	ntase
Tahun	Produksi (ton)	Nilai (Rpjuta)	Produksi	Nilai
2002	2835	12.223,001		
2003	948	5.784,013	-199,05%	-111,32%
2004	979	8.410,530	3,17%	31,23%
2005	1847	10.799,001	47,00%	22,12%
2006	1984	10.005,133	6,91%	-7,93%
2007	2219	13.505,133	10,59%	25,92%
2008	2354	17.379,734	5,73%	22,29%
2009	2313	24.335,898	-1,77%	28,58%
2010	2507	31.389,960	7,74%	22,47%
2011	2572	32.818,204	2,53%	4,35%
2012	2712	36.340,441	5,16%	9,69%
Rata-rata	2.115,45	18.453,732	9,67%	17,64%

Data potensi produsksi perikanan yang ada di PPN Karangantu diperoleh dari pencatatan pendataan hasil tangkapan yang dilakukan oleh petugas pencatatan. Data yang diperoleh masih ada kekurangan hal ini disebabkan karena keterbatasan kondisi pencatatan data yang dilakukan oleh PPN Karangantu. Adapun data hasil tangkapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 11.

Dari Tabel 11 dan lampiran 2 terlihat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, produksi dan nilai produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu mengalami fluktuasi. Produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu mengalami fluktuasi dan trendnya

mengalami peningkatan. Penurunan produksi tahun 2003 sebesar -199,05 % dan pada tahun 2009 penurunan produksi sebesar -1,77 %.

Pada Tahun 2005 produksi hasil tangkapan mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini disebabkan adanya beberapa perubahan alat tangkap yang digunakan dari tahun sebelumnya namun walaupun demikan kenaikan produksi tersebut tidak diimbangi oleh kenaikan nilai produksi. Hal ini disebabkan oleh jenis ikan yang tertangkap pada tahun 2006 ini didominasi oleh ikan pelagis kecil yang harganya relatif lebih murah. Dari tabel tersebut juga terlihat secara umum kenaikan rata-rata produksi ikan terjadi pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2005 sebesar 47.00% dan rata-rata nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 22.12%.

Pada Tahun 2005 volume produksi yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sebesar 1874 ton dengan nilai Rp. 10.799.001.000 dibanding dengan Tahun 2004 sebesar 979 ton dengan nilai Rp. 8.410.530.000,. Ini berarti mengalami kenaikan volume sebesar 47,00% dan kenaikan nilai produksi sebesar 22,12%. Rata-rata harga ikan mengalami penurunan yaitu Rp8.590 per Kg pada Tahun 2004 menjadi Rp. 5.847 per Kg pada Tahun 2005, turunnya rata-rata harga ikan ini disebabkan oleh jenis ikan yang tertangkap didominasi oleh ikan pelagis kecil yaitu ikan peperek yang harganya relatif lebih murah . Produski per jenis dan harga ikan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pada Tahun 2006 volume produksi yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu sebesar 1.984 ton dengan nilai Rp. 10.005.884.000 dibanding dengan Tahun 2005 sebesar 1.847 ton dengan nilai Rp. 10.799.001.000 Ini berarti mengalami kenaikan volume sebesar 6,91% dan penurunan nilai produksi sebesar -7,93%.

Rata-rata harga ikan mengalami penurunan yaitu Rp. 5.847 per Kg pada Tahun 2005 menjadi Rp. 5.043 per Kg pada Tahun 2006, turunnya rata-rata harga ikan ini disebabkan oleh jenis ikan yang tertangkap didominasi oleh ikan pelagis kecil yaitu ikan peperek yang harganya relatif lebih murah.

Secara keseluruhan Volume Produksi perikanan di PPN Karangantu pada tahun 2002-2012 rata-rata produki masih positif yaitu sebesar 2115, 45 ton dengan persentase rata-rata kenaikan produksi 9,67%.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan Nilai Produksi perikanan pada tahun 2002 sampai tahun 2012 bergerak positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 17,64%. Hal ini didukung dengan adanya kenaikan harga ikan dan jenis ikan yang ditangkap pada tahun 2007 sampai 2012.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Pembangunan PPN Karangantu memberikan pengaruh positif terhadap Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di wilayah PPN Karangantu.

# D. Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan Masyarakat

Apapun maksud, tujuan atau makna yang melekat pada istilah pembangunan, semuanya akan selalu menunjuk kepada sesuatu yang positif untuk kepentingan manusia, artinya setiap pembangunan selalu diharapkan bermanfaat (Fandeli, 1992). Namun demikian, pada dasarnya, pada kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan termasuk pelabuhan perikanan dapat memberikan dampak secara fisik yang berupa ancaman terhadap kerusakan ekologi baik berupa kerusakan lahan, biologi, geologi maupun pencemaran. Kemudian, seperti umumnya pada setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan terjadi pula dampak sosial baik sosial

budaya maupun sosial ekonomi, baik yang bersifat positif maupun negative (Suratmo, 1998).

## 1. Persepsi Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan

Pembangunan dan pengembangan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat; antara lain adalah pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan tersebut teruta ma berfungsi dalam pelayanan jasa angkutan laut, jasa penumpang dan jasa lainnya di bidang perikanan termasuk *docking*, pengolahan ikan, sandar kapal dan pengadaan sarana penangkap ikan (DitJen Perikanan, 1994; DJPT, Kementerian KP, 2012).

Persepsi masyarakat sekitar PPN karangantu terhadap penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan Pendapatan sesudah adanya Pembangunan PPN Karangantu dapat dilihat pada Tabel 11.

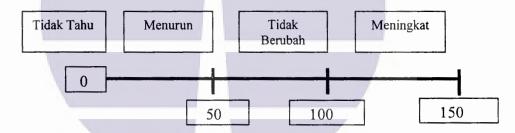
Tabel 11 Persepsi Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan terhadap adanya Pembangunan PPN Karangantu

Persepsi	Tidak tahu	Menurun	Tidak berubah	Meningkat
Penyerapan Tenaga kerja	28,00%	0,00%	0,00%	72,00%
Peningkatan Pendapatan	4,00%	0,00%	14,00%	82,00%

Berdasarkan Tabel 11 dapat dianalisis bahwa sebanyak 72 % dari 50 responden berpersepsi bahwa Penyerapan Tenaga Kerja dengan adanya Pembangunan PPN karangantu cenderung meningkat, hal ini didukung dengan bertambah kebutuhan tenaga kerja seiring dengan pembangunan sarana fasilitas PPN karangantu seperti Tempat Pelelangan Ikan, Pabrik Es dan docking kapal serta fasilitas lainnya yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan terhadap Peningkatan Pendapatan, sebanyak 82 % berpersepsi meningkat dibanding sebelum adanya Pembangunan PPN Karangantu. Sedangkan sebanyak 14% menjawab tidak berubah.

Hasil data dianalisis dengan Skala Likert dari data responden sebanyak 50 orang. Nilai Skoring untuk skala likert terhadap seluruh item pertanyaan Persepsi Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan yaitu Tidak Tahu = 0, Menurun = 1, Tidak Berubah = 2, Meningkat = 3. Jumlah Skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = 3 x 50 = 150 (seandainya semua menjawab meningkat) dan memiliki rentangan skala kontinum sebagai berikut :



Hasil data skala likert untuk Persepsi masyarakat terhadap kondisi Penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan Pendapatan di sekitar PPN karangantu dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Skala Likert Persepsi Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan di sekitar PPN Karangantu

Persepsi	Total Skoring	Persentase Kontinum
Penyerapan Tenaga Kerja	108	72,00%
Peningkatan Pendapatan	136	90,67%

Hasil skala likert dijelaskan sebagai berikut :

a) Persepsi Penyerapan Tenaga Kerja, berdasarkan hasil olahan menjawab meningkat dengan berada pada kontinum 108 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (108:150) x 100% = 72,00%. Sehingga kondisi

- Penyerapan Tenaga Kerja sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung Meningkat.
- b) Persepsi kondisi peningkatan pendapatan, berdasarkan hasil olahan menjawab meningkat dengan berada pada kontinum 136 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (136:150) x 100% = 90,67%. Sehingga Peningkatan Pendapatan sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung Meningkat.
- 2. Pengaruh Peningkatan Pendapatan sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN Karangantu

Peningkatan Pendapatan masyarakat pesisir mengalami perubahan sesudah adanya Pembangunan PPN Karangantu. Data perubahan Peningkatan Pendapatan sebelum dan sesudah diperoleh, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan Paired Sample T Test dengan menggunakan SPSS untuk mengukur korelasi hubungan dengan interval kepercayaan 95%. Hasil olahan data menggunakan Paired Sample T Test adalah sebagai berikut:

		Pa	aired Samp	oles Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	on	Std. Error	Mean
Pair 1	Sebelum	1.15E6	50	4427	11.958	626	08.925
	Sesudah	1.63E6	50	464331.910		656	66.448
		Pai	red Sample	es Correlations			
			N	Correlation		Sig.	
Pair 1	Pair 1 Sebelum & Sesudah 50 .889 .				.000		
			Paired S	Samples Test			
			Paired Diffe	erences			
				95% Confidence In Difference		the	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Uppe	t t	1

**Paired Samples Statistics** 

		Mean	N	Std. Deviation	on	Std. Error Mean			
Pair 1	Sebelum	1.15E6	50	4427	11.958	62608.925			
	Sesudah	1.63E6	50	4643	31.910	65666.448			
Paired Samples Correlations									
			N	Correlation		Sig.			
Sebelum Sesudah		214889.245	30389.929	-536470.848	414329.1	-15.643			

Berdasarkan data di atas bahwa nilai korelasi cukup besar yaitu 0,889 dengan Nilai Sig (0,000) < α (0,05) dimana α (0,05) adalah 1,6759 Sehingga H<sub>0</sub> ditolak. Dan jika dilihat dari nilai t hitung dapat dilihat bahwa berdasarkan data di atas nilai t hitung adalah -15,643 kemudian nilai tersebut dimutlakkan dan dibandingkan dengan nilai t tabel.

Maka Nilai t hitung (15,643) > t tabel (0,950,49) 1,6766. Sehingga H<sub>0</sub> ditolak, yang artinya Pembangunan PPN Karangantu berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan masyarakat di sekitar Pelabuhan Perikanan Karangantu.

3. Pengaruh Pembangunan PPN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di PPN Karangantu

Berdasarkan hasil analisis persepsi masyarakat akan pengaruh pembangunan PPN terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat diketahui sebagai berikut :

a) Berdasarkan persepsi masyarakat/responden bahwa adanya pembangunan PPN Karangantu memberikan dampak meningkat dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah responden 50 sebesar 72% memiliki persepsi meningkat. Sedangkan terhadap peningkatan pendapatan dengan jumlah responden 50 sebesar 90,67% memiliki persepsi meningkat. b) Adanya Pembangunan PPN Karangantu diketahui bahwa Pembangunan PPN Karangantu memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat disekitar PPN Karangantu dengan nilai korelasi berdasarkan uji Paired Sample T-Test memiliki nilai korelasi 0,889 yang berarti mendekati 1 yang artinya memberikan pengaruh kuat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar PPN Karangantu.

## E. Persepsi Masyarakat Terhadap Lingkungan PPN Karangantu

Manusia memasuki suatu ekosistim tidaklah semata-mata hanya sebagai suatu organisme yang mempunyai hubungan fisik dengan organisme lain. Manusia juga membawa kebudayaan, suatu faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seluruh total jaringan kehidupan (Haeruman, 1979). Perhatian terhadap manusia telah berlangsung sejak lama, semenjak orang mengenal kebudayaan dan peradapan. Perhatian tersebut bermula sebagai pemikiran secara filsafat yang mengidam-idamkan masyarakat yang baik dan sejahtera (Soekanto, 1998).

Persepsi masyarakat sekitar PPN Karangantu terhadap kondisi lingkungan akibat adanya Pembangunan PPN Karangantu dianalisis untuk dapat diukur apakah Pembangunan PPN Karangantu memberikan dampak Positif terhadap Lingkungan sekitar PPN Karangantu berdasarkan Persepsi masyarakat. Hasil Persepsi masyarakat terhadap Lingkungan disekitar PPN Karangantu dapat dilihat pada Tabel 12 dan lampiran 3.

Tabel 13 Persepsi Masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu terhadap Kondisi Lingkungan

KONDISI LINGKUNGAN	Tidak tahu	Semakin buruk	Tidak berubah	Semakin baik
Kondisi kebersihan perairan	2,00%	14,00%	48,00%	36,00%
Kondisi bau	0,00%	78,00%	20,00%	2,00%
Kondisi rasa air minum	0,00%	2,00%	96,00%	2,00%
Kondisi warna air termasuk air minum	2,00%	2,00%	94,00%	2,00%
Kondisi sampah	2,00%	90,00%	6,00%	2,00%
Kondisi limbah perikanan	0,00%	90,00%	6,00%	4,00%
Kondisi MCK	8,00%	8,00%	76,00%	8,00%
Kondisi tempat tinggal masyarakat	12,00%	4,00%	76,00%	8,00%

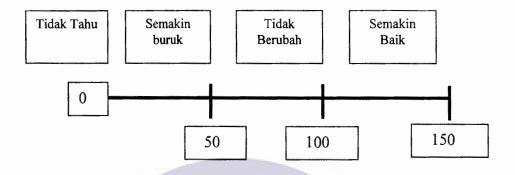
Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 13 menjelaskankan bahwa:

- 1. Persepsi Kondisi Kebersihan Perairan, yaitu 48,00% masyarakat yang bekerja di sekitar PPN mempunyai persepsi bahwa kondisi lingkungan pesisir yang berada di sekitar pelabuhan perikanan tidak berubah. Hanya 36,00% masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa kondisi lingkungan pesisir di sekitar pelabuhan perikanan semakin baik. Kemudian, 14.00% masyarakat mempunyai persepsi bahwa kondisi lingkungan pesisir setelah adanya pembangunan pelabuhan semakin memburuk
- 2. Persepsi Kondisi bau, yaitu 78,00% masyarakat yang bekerja di sekitar PPN mempunyai persepsi bahwa kondisi bau yang berada di sekitar pelabuhan perikanan semakin buruk. Hanya 20,00 % masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa kondisi bau di sekitar pelabuhan perikanan tidak berubah
- Persepsi Kondisi Rasa Air Minum, yaitu 96,00% masyarakat yang bekerja di sekitar PPN mempunyai persepsi bahwa kondisi lingkungan pesisir yang berada di sekitar pelabuhan perikanan tidak berubah.

- 4. Persepsi Warna Air temasuk air minum, yaitu 94,00% masyarakat yang bekerja di sekitar PPN mempunyai persepsi bahwa kondisi lingkungan pesisir yang berada di sekitar pelabuhan perikanan tidak berubah.
- Persepsi Kondisi Sampah, yaitu 90,00% masyarakat yang bekerja di sekitar
   PPN mempunyai persepsi bahwa kondisi sampah yang berada di sekitar pelabuhan perikanan semakin buruk.
- 6. Persepsi Kondisi Limbah Perikanan, yaitu 90,00% masyarakat yang bekerja di sekitar PPN mempunyai persepsi bahwa kondisi limbah perikanan yang berada di sekitar pelabuhan perikana n semakin buruk.
- 7. Persepsi Kondisi MCK, yaitu 76,00% masyarakat yang bekerja di sekitar PPN mempunyai persepsi bahwa kondisi lingkungan pesisir yang berada di sekitar pelabuhan perikanan tidak berubah.
- 8. Persepsi Kondisi Tempat Tinggal Masyarakat, yaitu 76,00% masyarakat yang bekerja di sekitar PPN mempunyai persepsi bahwa kondisi lingkungan pesisir yang berada di sekitar pelabuhan perikanan tidak berubah.

Hasil data dianalisis dengan Skala Likert dari data responden sebanyak 50 orang. Nilai Skoring untuk skala likert terhadap seluruh item pertanyaan kondisi lingkungan yaitu Tidak Tahu = 0, Semakin Buruk = 1, Tidak Berubah = 2, Semakin Baik = 3. Jumlah Skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = 3 x 50 = 150 (seandainya semua menjawab semakin baik) dan memiliki rentangan skala kontinum sebagai berikut:



Hasil data skala likert untuk Persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan di sekitar PPN karangantu dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Skala Likert Persepsi Masyarakat terhadap kondisi Lingkungan di Sekitar PPN Karangantu.

KONDISI LINGKUNGAN	Total Skoring	Persentase Kontinum		
Konsdisi kebersihan perairan	109	72,67%		
Kondisi bau	62	41,33%		
Kondisi rasa air minum	100	66,67%		
Kondisi warna air termasuk air minum	98	65,33%		
Kondisi sampah	54	36,00%		
Kondisi limbah perikanan	60	40,00%		
Kondisi MCK	92	61,33%		
Kondisi tempat tinggal masyarakat	90	90 60,00%		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data Tabel 14. dapat diuraikan sebagai berikut :

Persepsi kondisi kebersihan perairan, berdasarkan hasil olahan menjawab semakin baik dengan berada pada kontinum 109 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (109:150) x 100% = 72,67%. Sehingga kebersihan perairan sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung Semakin Baik.

- 2. Persepsi kondisi bau, berdasarkan hasil olahan menjawab tidak berubah dengan berada pada kontinum 62 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (62:150) x 100% = 41,33%. Sehingga kebersihan perairan sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung tidak ada perubahan.
- 3. Persepsi kondisi rasa air, berdasarkan hasil olahan menjawab tidak berubah dengan berada pada kontinum 100 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (100:150) x 100% = 66,67%. Sehingga kondisi rasa air sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung tidak ada perubahan dan cenderung semakin baik.
- 4. Persepsi kondisi warna air termasuk air minum, berdasarkan hasil olahan menjawab tidak berubah dengan berada pada kontinum 98 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (98:150) x 100% = 65,33%. Sehingga kondisi warna air sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung tidak ada perubahan.
- 5. Persepsi kondisi sampah, berdasarkan hasil olahan menjawab tidak berubah dengan berada pada kontinum 54 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (54:150) x 100% = 36,00%. Sehingga kondisi sampah sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung semakin buruk.
- 6. Persepsi kondisi Limbah perikanan, berdasarkan hasil olahan menjawab tidak berubah dengan berada pada kontinum 60 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (60:150) x 100% = 61,33%. Sehingga kondisi limbah perikanan sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung semakin buruk

- 7. Persepsi kondisi MCK, berdasarkan hasil olahan menjawab tidak berubah dengan berada pada kontinum 92 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (92:150) x 100% = 61,33%. Sehingga kondisi MCK sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung tidak berubah.
- 8. Persepsi kondisi tempat tinggal masyarakat, berdasarkan hasil olahan menjawab tidak berubah dengan berada pada kontinum 90 dengan tingkat persentase terhadap item tersebut = (90:150) x 100% = 60,00%. Sehingga tempat tinggal masyarakat sebelum dan sesudah adanya Pembangunan PPN cenderung tidak berubah.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

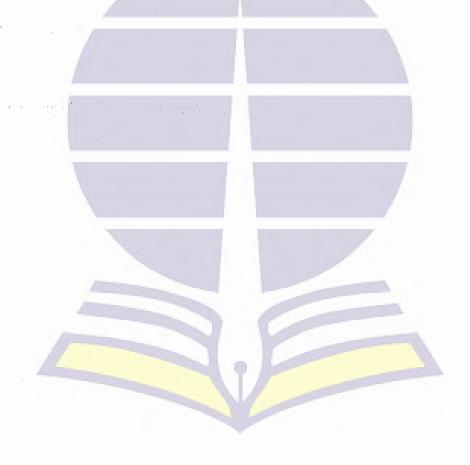
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data data yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa :

- Pembangunan PPN Karangantu berpengaruh positip dengan persentase kenaikan produksi sebesar 9,67 %. Sedangkan untuk nilai produksi juga berpengaruh positip dengan rata rata kenaikan sebesar 17,64 %
- 2. Pengaruh pembangunan terhadap penyerapan tenaga kerja dipersepsi 72 % meningkat. Sedagkan terhadap peningkatan pendapaatan dipersepsi 90,67 % cenderung meningkat. Disimpulkan bahwa pembangunan PPN Karangantu berpengaruh kuat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar Pelabuhan
- 3. Persepsi masyarakat sebelum dan seseudah pembanguan PPN Karangantu dengan menilai beberapa kondisi lingkungan antara lain :
  - 1) Kondisi kebersihan perairan dipersepsi 72,6 % semakin membaik
  - 2) Kondisi bau perairan dipersepsi 41,33 % tidak ada perubahan
  - 3) Kondisi rasa air dipersepsi 66,67 % tidak ada perubahan dan cenderung semakin membaik.
  - 4) Kondisi warna air dipersepsi 65,33 % tidak ada perubahan
  - 5) Kondisi sampah dipersepsi 36.00 % semakin memburuk
  - 6) Kondisi limbah perikanan dipersepsi 61,33 % semakin buruk
  - 7) Kondisi MCK dipersepsi 61.33 % tidak berubah
  - 8) Kondisi tempat tinggal masyarakat dipersepsi 60,00 % tidak berubah.

### B. Saran

Pembangunan pelabuhan perikanan nusantara Karangantu harus memperhatikan dan memperbaiki pengaruh negatif pada kondisi sampah dan kondisi limbah perairan dengan menerapkan pengelolaan yang baik.

Perawatan rutin tetap harus dilaksanakan , untuk menjaga fasiltas sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.



#### DAFTAR PUSTAKA

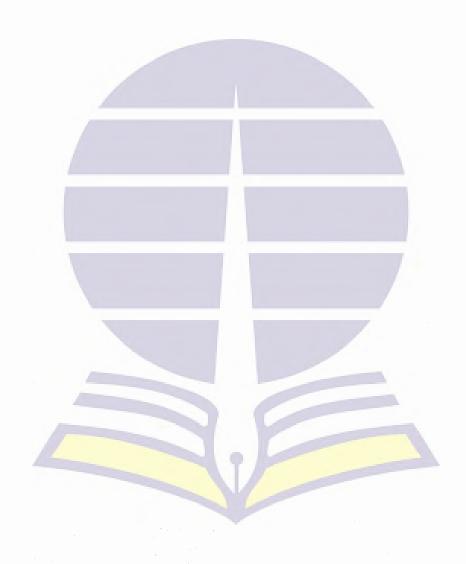
- Adrianto, L. (2004). Pembangunan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan (Sustainable Small Islands Development and Management). Makalah disampaikan pada Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (Training on Integrated Coastal Zone Management), kerjasama antara Marine and Coastal Resources Management Project, Departemen Kelautan dan Perikanan dan PKSPL-IPB, Bogor, 23 Agustus 25 September 2004
- Anonimous. (1981). Standar Rencana Induk dan Pokok-pokok Desain untuk Pelabuhan Perikanan dan PPI. Inconeb dan Ditjen Perikanan Deptan.
- Anonimous. (2001). Perencanaan dan Pembentukan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Laporan Akhir: Volume I Laporan Utama. Ditjen Perikanan Tangkap, DKP.
- Anonimous. (2002). Buku Petunjuk Pelaksanaan Konstruksi Pelabuhan Perikanan. Jilid I s/d VI. Ditjen Perikanan Tangkap, DKP.
- Anonimous. (2004). Buku Perencanaan/Rehabilitasi Dermaga. Ditjen Perikanan Tangkap, DKP.
- Anonimous. (2007-a). Modul Proses Pantai dan Bangunan Pantai. Workshop Analisa dan Perencanaan Breakwater (Denpasar 22-25 April 2007). Ditjen Perikanan Tangkap, DKP.
- Anonimous. (2007-b). Modul Uji Fisik dalam Perencanaan Breakwater. Workshop Analisa dan Perencanaan Breakwater (Denpasar 22-25 April 2007). Ditjen Perikanan Tangkap, DKP.
- Anonimous. (2007-c). Panduan Genesis. Workshop Analisa dan Perencanaan Breakwater (Denpasar 22-25 April 2007). Ditjen Perikanan Tangkap, DKP.
- Anonimous. (2008). Bahan Kuliah Pertama/ Kedua / Ketiga. Akademi Usaha Perikanan, Jakarta. (tidak diterbitkan
- Dahuri, R. (1996). Dampak Pembangunan dan Penanganannya pada Ekosistem Perairan. Kumpulan Materi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Institus Pertanian Bogor. 16 p
- Dahuri, R. (2004). Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum, Pesisir, dan Laut Dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Disampaikan Pada Acara Perecanaan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (ICZPM), Bogor 16 September 2004. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., dan Sitepu, M.J. (1996). Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 301 p.
- Damopilii. (1996). Pengertian dan Proses serta Manfaat AMDAL. Kumpulan Materi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Institut Pertanian Bogor. 21 p.
- Danuningrat, A. (1977). Kuliah Pelabuhan, Bagian I. Seksi Publikasi Departemen Teknik Sipil ITB. Bandung.
- Direktorat Jenderal Perikanan. (1994). Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Direktorat Bina Prasarana. Direktorat Jenderal Perikanan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2012). Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (tidak diterbitkan)
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2014). Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (tidak diterbitkan)
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2012). Rencana Strategis Pembangunan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Indonesia. Jakarta. (tidak diterbitkan).
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Laporan Tahunan (LAPTAH) Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2014.
- Fandeli, C. (1992). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Prinsip Dasar dan Penerapannya Dalam Pembangunan. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 346 hal.
- Hadi, S.P. (1997). Aspek Sosial AMDAL. Sejarah, Teori dan Metode. Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- Haeruman, H. (1979). Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekolah Pasca Sarjana. Jurusan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Institut Pertanian Bogor. 284 hal.
- Haryadi dan Setiawan, B. (1995). Arsitektur Lingkungan dan Perilaku, Suatu Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi. Universitas Gadjah Mada dan Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Idris, I. (2003). Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau –pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 14 p.
- Kramadibrata, S. (1985). Perencanaan Pelabuhan. Ganeca Exact. Bandung.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2006). Permen KP No.PER.16/MEN/2006 tentang pelabuhan perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2010). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, nomor: PER.29/MEN/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Oranisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.
- Lubis, E. (2002). Pengantar Pelabuhan Perikanan. Buku I. Laboratorium Pelabuhan Perikanan. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Murdiyanto, B. (2003). Pelabuhan Perikanan; Fungsi, Fasilitas, Panduan Operasional, Antrian Kapal. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor. 142 hal.
- Nasir, M. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- PPN Karangantu. (2012). Laporan Tahunan (Laptah) Pelabuhan Perikanan Nusantara tahun 2011. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (tidak diterbitkan).
- Siegel, S. (1997). Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Gramedia. Jakarta.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. (1989). Metode Penelitian Survei. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Soejoeti, Z. (2006). Materi Pokok Statistika 1–6; MMPI15103/2SKS/Zamzawi Soejoeti, cetakan I, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka,
- Soekanto, S. (1998). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soerjani, M., Ahmad R. dan Munir R. (1987). Lingkungan: Sumberdaya alam dan kependudukan dalam pembanguan. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta
- Surat Keputusan Menteri Pertanian. (1999). SK Mentan No. 995/Kpts/IK.210/9/99 tanggal 29 September 1999 tentang Potensi Sumberdaya Ikan.
- Suratmo, F.G. (1998). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Tapangan, T. (2001). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pelabuhan Perikanan Di Indonesia: Aplikasi Kebijakan Pemerintah di PPN Pelabuhan Ratu. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tidak Diterbitkan.

Wahyono, (2001). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Yogjakarta : Media Presindo.



### **LAMPIRAN**

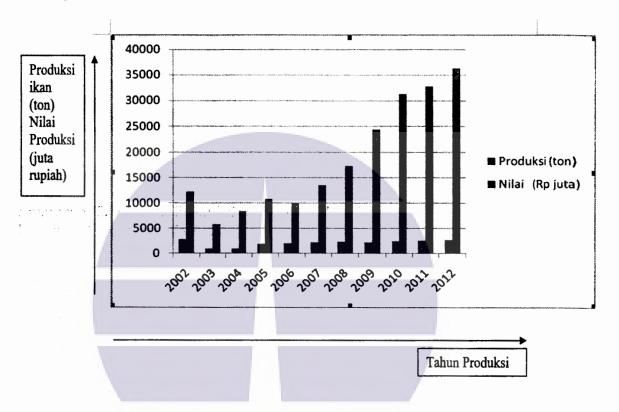
Lampiran 1. Data Produksi dan nilai produksi ikan menurut jenisnya di PPN Karangantu tahun 2002 -2011

Daftar Produksi dan Nilai Produksi Ikan Menurut Jenisnya di PPN Karangantu dari Tahun 2002 - 2006

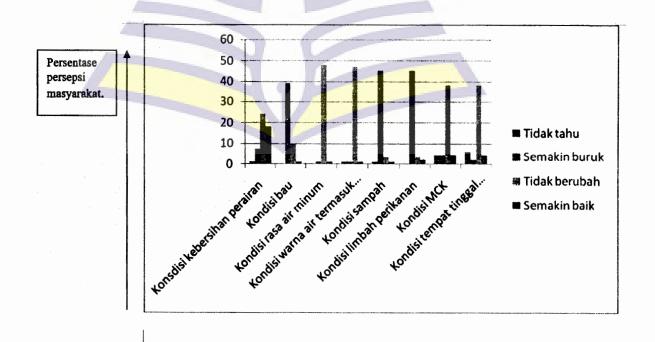
(Ribuan)

No	Jenis ikan	2002		2003		2004		2005		2006	
		Produk si (Ton)	Nilai (Rp	Produksi (Ton)	Nilai (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai	Produksi (Ton)	Nilai (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp)
1	Layur	101	607.740	23	133.050	23	160.130	104	545.420	71	362.265
2	Layang	103	619.320	19	118.890	21	100.607	59	210.125	31	180.084
3	Lemuru	46	197. <b>325</b>	15	79.700	14	77.987	23	89.187	-	
4	Teri	215	1.312.140	107	642.450	50	380.409	201	1.207.362	203	1.302.176
5	Tenggiri	26	267.350	6	64.050	7	126.780	14	204.910	27	427.370
6	Tongkol	62	500,620	14	113.240	11	97.405	40	14.167	43	430.615
7	Tembang	136	136.855	68	68.380	91	227.797	197	499.380	269	873.364
8	Belanak	53	268.050	11	59.100	11	57.517	24	136.313	29	185.401
9	Kembung	86	693.240	42	340.600	66	496.821	105	825.196	134	1.271.718
10	Peperek	153	358.390	101	202.250	182	336.862	424	630.103	551	940.435
11	Cucut	37	149.560	7	30.980	8	41.685	17	69.159	•	
12	Selar	115	577.850	21	105.700	20	101.955	62	230.305	83	356.269
13	Udang	40	2.049.500	12	541.350	8	405.250	31	1.507.214	9	395.726
14	Kerapu	20	309.975	4	66,075	5	139.492	10	368.115	-	
15	Kakap	30	457.125	5	87.150	7	99.092	20	349.390	21	463.675
16	Merah	26	263.280	7	74.850	7	11.487	17	204.340	27	547.360
17	Kuwe	13	65.350	9	38.250	6	35.453	20	104.937	24	126.693
18	Manyung	41	621.150	11	166.500	7	100.448	48	624.972	40	652.594
19	Cumi-cumi	5	84.150	4	60.945	6	219.305	6	269.955	13	10.778
20	Bawal	12	62.275					50	127.187	26	65.775
21	Belaso	27	139.250	10	52.000	14	47.985	1	18.880	4	16.555
22	Ekor Kuni	151	1.256.480	307	2.553.760	327	4.932.630	113	1.694.030	19	326.825
23	nng	92	461.750	16	82.775	24	89.372	116	324.136	108	380.086
24	Rajungan	26	106.260	6	26.320	7	30.812	11	37.713	13	36.869
25	Kurisi Pari Lain-lain	1.206	601.657	113	46.005	48	24.322	124	214.314	236	635.263
	Jumlah	2.835	12.223.027	948	5.784.013	979	8.410.530	1 847	10.799.001	1.984	10.005.884

Lampiran 2. Grafik Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu tahun 2002-2012



Lampiran 3. Grafik Persepsi Masyarakat sekitar PPN Karangantu terhadap Kondisi Lingkungan



# Lampiran 4. Perhitungan Paired Sample T Test.

### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair	Sebelum	1.15E6	50	442711.958	62608.925
1	Sesudah	1.63E6	50	464331.910	65666.448

### Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair Sebelum & Sesudah	50	.889	.000

### Paired Samples Test

			4		Paired Differences					
				95% Confidence Interval of the Difference				Sig. (2-		
			Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	tailed)
Pair 1	Sebelum Sesudah	-	-4.754E5	214889.245	30389.929	-536470.848	-414329.152	-15.643	49	.000



## **DOKUMENTASI**



Gambar 1. Gerbang menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu



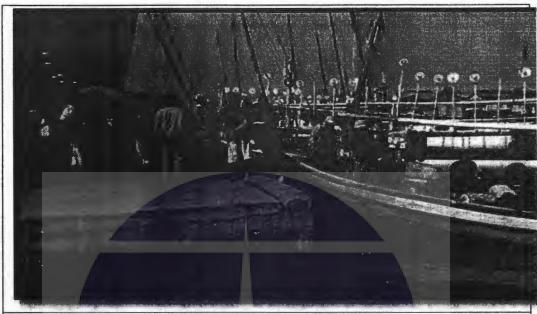
Gambar 2. Foto udara Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu



Gambar 3. Fasilitas pokok dan fasilitas fungsional



Gambar 4. Akses jalan menuju pantai



Gambar 5. Kegiatan pembongkaran ikan di Dermaga



Gambar 6. Kegiatan di TPI Hygienis



Gambar 7. Kegiatan pelelangan ikan di TPI Hygienis

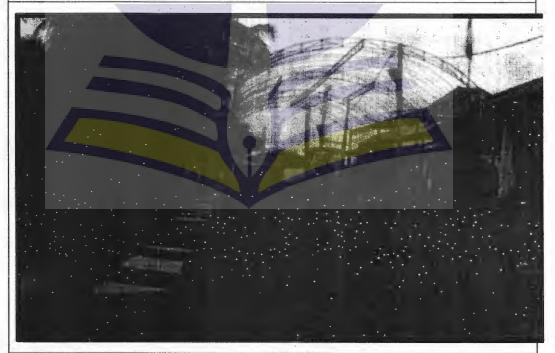


Gambar 8. Pabrik es kapasitas 13 ton/hari

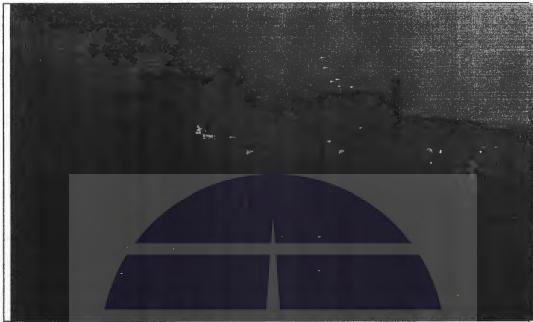
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Gambar 9. Kegiatan bengkel PPN karangantu



Gambar 10. Gedung Pertemuan Nelayan dan akses jalan di komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu



Gambar 11. Kegiatan ojeg dan alat angkut lain



Gambar 12. Warung, lapak jual ikan dan ojeg



Gambar 13. Kegiatan kebersihan lingkungan dan latar MCK



Gambar 14. Penjual ikan dan warung kelontong